

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengukuran Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 3, 2018).

Menurut Judijanto & Afandy (2024), Pengukuran kinerja adalah suatu proses penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan, program, atau layanan yang disediakan oleh entitas publik kepada masyarakat.

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dengan memberikan laporan kinerja yang terperinci, sektor publik memberikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, memungkinkan untuk memahami dan menilai efektivitas penggunaan sumber daya publik. Tujuan ini menciptakan dasar untuk hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, dengan mendorong keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (Judijanto & Afandy, 2024).

2.1.3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2.1.3.1 Konsep LKjIP

Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 53 (2014) di mana pelaporan capaian kinerja organisasi

secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja

LKjIP disusun secara berkala, biasanya setiap akhir tahun anggaran, untuk melaporkan realisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Rencana Kerja dan Anggaran/RKA), termasuk indikator kinerja utama seperti efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Dokumen ini mencakup beberapa bagian utama, yaitu ringkasan eksekutif, laporan capaian kinerja (termasuk tabel realisasi target dan rasio pencapaian), laporan keuangan, evaluasi internal, serta rencana perbaikan untuk periode berikutnya, yang semuanya didukung oleh data, bukti, dan analisis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada DPR, masyarakat, serta lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP.

LKJIP tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi internal, tetapi juga menjadi dasar penilaian kinerja pegawai dan instansi oleh Kementerian PANRB melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), dengan tingkatan nilai seperti AA (sangat baik), A (baik), BB (cukup), B (kurang), dan CC (sangat kurang).

2.1.3.2 Format LKjIP

Format pembuatan LKjIP sesuai dengan Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 3 (2018) adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berisikan latar belakang penyusunan Laporan Kinerja OPD

B. TUGAS DAN WEWENANG

Berisikan tugas dan fungsi OPD secara umum

C. DASAR HUKUM

Berisikan dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja OPD

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

Berisikan Ringkasan Rencana Strategis OPD

B. PERJANJIAN KINERJA

Berisikan Perjanjian Kinerja OPD tahun yang akan dilaporkan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET

KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86, 2017).

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan Uraian Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

D. REALISASI ANGGARAN

Berisikan uraian Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Kinerja OPD

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

2.1.4 Value For Money

2.1.4.1 Konsep *Value For Money*

Menurut Rahman et al (2025) dalam buku Akuntansi Sektor Publik, Organisasi sektor publik dituntut untuk melaksanakan setiap kegiatannya dengan menerapkan konsep *Value For Money*. Konsep ini dipahami sebagai pendekatan dalam pengelolaan sektor publik yang berfokus pada tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

- **Ekonomi**

Ekonomi memiliki kaitannya dengan kemampuan organisasi atau lembaga sektor publik dalam memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas yang optimal pada biaya serendah mungkin. Dalam hal ini, ekonomi bisa dikatakan bentuk perbandingan antara input dengan nilai input (input value) yang diukur dalam satuan keuangan. Penerapan prinsip ekonomi ini berfokus pada upaya meminimalkan pemborosan sumber daya.

- **Efisiensi**

Prinsip Efisiensi menunjukkan perbandingan antara output yang dikeluarkan dengan input yang digunakan, sesuai dengan target atau standar kinerja yang sudah ditetapkan.

- **Efektivitas**

Sebagai Efektivitas menilai sejauh mana organisasi sektor publik dapat mencapai tujuan atau target yang telah direncanakan. Dalam bahasa sederhana, efektivitas dapat dipahami perbandingan antara outcome (hasil) dengan output (keluaran) dari suatu program.

Ketiga dimensi ini adalah elemen inti dalam konsep *Value For Money*.

2.1.4.2 Tujuan *Value For Money*

Berikut tujuan penerapan Value for Money yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas merupakan salah satu manfaat utama dari penerapan Audit Value for Money (VFM). Audit VFM memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana dana publik digunakan dan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan menganalisis aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu proyek atau kegiatan, audit ini memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan kinerja sektor publik. Informasi yang dihasilkan dari audit ini menyediakan dasar yang kuat untuk pertanggungjawaban, memungkinkan pemangku kepentingan, manajemen pemerintah, dan publik umum untuk mengukur sejauh mana dana publik digunakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, meningkatkan akuntabilitas adalah langkah kunci dalam memperbaiki tata kelola keuangan sektor publik dan memastikan pertanggungjawaban yang optimal terhadap masyarakat.

2. Memberikan Rekomendasi Perbaikan Hasil audit

Dalam konteks Value for Money, memberikan landasan yang kuat untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat memajukan pengelolaan keuangan dan implementasi kebijakan suatu entitas. Audit mengidentifikasi potensi pemborosan, ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya, atau kelemahan dalam proses pelaksanaan proyek atau kegiatan. Rekomendasi yang dihasilkan dari audit tersebut dapat memberikan panduan praktis bagi manajemen atau pihak terkait untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

3. Memastikan Pertanggungjawaban

Audit Value for Money (VFM) berperan penting dalam memastikan pertanggungjawaban entitas pemerintah atau sektor publik terhadap penggunaan dana publik. Dengan mengevaluasi aspek ekonomi, efisiensi, dan

efektivitas dalam proyek atau kegiatan, audit VFM memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap kinerja sektor publik (Judijanto & Afandy, 2024)

2.1.5 Langkah – Langkah Pengukuran Value For Money

a. Pengukuran Ekonomi

Indarriyanti et al (2025) menyatakan bahwa faktor ekonomi dikaitkan dengan sejauh mana suatu forum pemerintah mengurangi penggunaan sumber daya produksi yang dilakukan dengan menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Kegiatan seperti ini bisa disebut sebagai kegiatan ekonomis jika dapat membatasi pengeluaran biaya yang tidak penting atau tidak diperlukan.

Rumus mengukur tingkat ekonomi (Mahsun, 2020):

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Yang memiliki kriteria adalah sebagai berikut:

1. < 100% maka dinyatakan ekonomis,
2. = 100% maka dinyatakan ekonomi berimbang,
3. >100% maka dinyatakan tidak ekonomis.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan sektor publik menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan output yang optimal dengan penggunaan input yang paling minimal. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila target atau sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya yang serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang diperoleh. Dengan demikian, efisiensi mencerminkan perbandingan antara input dan output, di mana semakin kecil input yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu, maka semakin tinggi tingkat efisiensi kegiatan tersebut. Konsep ini menegaskan bahwa pencapaian tujuan

organisasi publik harus disertai dengan pengelolaan sumber daya yang hemat dan tepat guna Mardiasmo (2018) dalam (Indarriyanti et al., 2025).

Rumus mengukur tingkat efektifitas menurut Mahsun (2020): adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Capaian Anggaran}} \times 100\%$$

dengan Kriteria, menurut Mahsun (2020):

1. < 100% maka dinyatakan tidak efisien,
2. = 100% maka dinyatakan efisiensi berimbang,
3. >100% maka dinyatakan efisien.

c. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas tidak hanya menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana hasil yang dicapai memberikan manfaat nyata dan relevan bagi masyarakat serta pemangku kepentingan yang terlibat. Fokus pada efektivitas memungkinkan kegiatan atau proyek memberikan kontribusi yang lebih bermakna terhadap perbaikan dan perkembangan sesuai dengan tujuan pelaksanaannya (Judijanto & Afandy, 2024).

Efektivitas hanya menilai apakah sebuah program/kegiatan sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini rumus pengukuran efektivitas menurut Mardiasmo (2018).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome: Capaian Kinerja

Angka outcome merupakan realisasi yang sudah dicapai dari pelaksanaan program atau kegiatan.

Output : Target Kinerja

Angka output merupakan target sasaran dari program - program yang sudah dilaksanakan.

dengan Kriteria, menurut Mahsun :

1. < 100% maka dinyatakan tidak efektif,
2. = 100% maka dinyatakan efektif berimbang,
3. >100% maka dinyatakan efektif.

2.2 Penelitian terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan menggunakan prinsip *Value For Money* menemukan hasil yang beragam seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	(Meitri, 2022)	Analisis <i>Value For Money</i> Pada Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kampar melalui prinsip <i>Value For Money</i>	Penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2019 dan 2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2019 perhitungan ekonomis dikategorikan ekonomis, perhitungan efisiensi dikatakan efisien. dan perhitungan efektivitas dikategorikan tidak efektivitas. Pada tahun 2020 perhitungan ekonomis dikategorikan ekonomis, perhitungan efisien dikategorikan efisien, dan perhitungan efektivitas tidak efektivitas. Dengan demikian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Kampar pada tahun 2019 dan 2020 yang ditinjau dari elemen

NO.	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
					ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) belum memenuhi prinsip <i>Value For Money</i> .
2	(Ma'rifah, 2022)	Analisis <i>Value For Money</i> Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau	Untuk menganalisa dan mengukur kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 dengan menggunakan prinsip <i>Value For Money</i>	Teknik yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau pada tahun 2019 dan 2020 telah ekonomis dan efisien namun belum memenuhi kriteria efektif menurut prinsip <i>Value For Money</i> Setelah dilakukan pengukuran pada setiap kegiatan yang ada pada program Dinas Pangan,

NO.	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
					<p>Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, didapatkan hasil total tingkat ekonomis tahun 2019 dan tahun 2020 termasuk pada kategori Ekonomis. Pada pengukuran efisien, total tingkat efisien pada tahun 2019 dan 2020 termasuk dalam kategori efisien dan pada pengukuran efektifitas tahun dan tahun 2020 kinerja pada tahun 2019 dan 2020 termasuk ada kategori tidak efektif.</p>

NO.	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
3	(Rhomadiningsih, 2024)	<i>Value For Money</i> dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar	Untuk mengukur kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar periode tahun 2019-2022 ditinjau menggunakan metode <i>Value For Money</i>	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan objek yang diteliti adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dari tahun 2019-2022 menggunakan pengukuran <i>Value For Money</i> ditinjau dari tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisien, dan efektivitas.	Hasil dari elemen efisien dan efektivitas belum dapat dikatakan sebagai kinerja yang efisien dan belum efektif.

NO.	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
4	(Hariantika, 2024)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan konsep <i>Value For Money</i> pada pemerintah provinsi sumatera utara	Untuk mengevaluasi kinerja keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan konsep <i>Value For Money</i>	Menggunakan penelitian deskriptif yang dilakukan selama periode lima tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan observasi	Dari segi ekonomi, terlihat bahwa rasio ekonomi selama periode tersebut mencapai kategori 'ekonomis'. Dari segi efisiensi, rasio efisiensi selama periode yang sama mencapai kategori 'efisien'. Sementara itu, dari segi efektivitas, rasio efektivitas selama periode tersebut juga mencapai kategori 'efektif'.
5	(Putri, 2024)	Analisis Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Dengan Pendekatan Metode <i>Value For Money</i>	Bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen tahun 2020-2022	Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, sumber data sekunder dari website resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.	Hasil penelitian ini ditinjau dari rasio ekonomis menunjukkan "Ekonomis". Ditinjau dari rasio efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 masuk kategori "Efisien", sedangkan ditahun 2022 masuk kategori "Tidak Efisien". Ditinjau dari

NO.	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
					Rasio Efektivitas ditahun 2020 dikategorikan “Tidak Efektif”, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan hasil “Efektif”
6	(Saputra, 2021)	Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Metode <i>Value For Money</i> Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020	Bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan konsep <i>Value For Money</i> .	Penelitian deskriptif dengan objek yang diteliti adalah data Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah	Periode tahun 2018-2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa rasio ekonomi diperoleh kategori “ekonomis”. Dari elemen efisiensi diketahui periode tahun 2018-2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa telah memenuhi rasio efisien

NO.	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
				Provinsi Jawa Tengah yang terdapat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada tahun 2018-2020. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan konsep <i>Value For Money</i> berdasarkan 3 pokok unsur-unsur seperti ekonomi,	diperoleh kategori “efisiensi”. kemudian dari elemen efektivitas diketahui periode tahun 2018-2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi rasio efektif diperoleh kategori “efektivitas”.

NO.	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
				efisiensi dan efektivitas.	

2.3 Kerangka Berfikir

Tabel 2.2 Kerangka Berfikir



